PEMERINTAH PUSAT BAGI DANA ALOKASI UMUM KE 160 DAERAH



Selasa, 21 Februari 2017

Pemerintah pusat telah menyelesaikan pembayaran tunggakan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 160 pemerintah daerah, meskipun mengalami defisit 2,4% pada tahun anggaran 2016. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga pembayaran kepada pihak ketiga.

Beberapa pemerintah daerah belum menerima DAU karena belum menyelesaikan persyaratan, sehingga transfer dari pemerintah pusat tertunda. Pemerintah pusat tetap berkomitmen untuk membayarkan DAU yang tertahan, dengan catatan bahwa pemerintah daerah telah menyelesaikan persyaratan.

Pemerintah akan mengendalikan defisit DAU agar tetap di angka 2,4% pada tahun ini. Penundaan DAU sebelumnya untuk 169 daerah dengan nilai total Rp 19,4 triliun dilakukan karena pemerintah pusat tengah melakukan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penundaan ini juga dipicu oleh alasan bahwa DAU tidak menyentuh program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa penundaan tersebut dilakukan untuk memastikan dana tersebut dialokasikan secara tepat sasaran.

Pemerintah pusat berupaya untuk mendistribusikan DAU secara adil dan efisien kepada seluruh daerah, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.